



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

Kegiatan Sosialisasi Diplomasi Parlemen “BKSAP SDGs Day”

“Urgensi Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Palembang melalui Sinergi dan Kolaborasi serta Optimalisasi Potensinya”

Tanggal 9 – 11 September 2021, Kota Palembang, Sumatera Selatan

I. PENDAHULUAN

Sosialisasi Diplomasi Parlemen di daerah yang dilakukan BKSAP bertujuan untuk menyuarakan agenda nasional dengan mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara dan berbagai stakeholder luar. Selain itu juga untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen terkait isu-isu global yang menjadi fokus bersama seperti pandemi covid-19, SDGs, terorisme, kesetaraan gender, demokrasi, HAM, kejahatan transnasional terorganisasi, korupsi dan beragam permasalahan regional dan global tersebut menuntut pendekatan lintas sektoral melalui *multi-track diplomacy* atau *total diplomacy* yang melibatkan banyak pihak termasuk parlemen.

Sinergi dan Kolaborasi yang dapat dioptimalkan melalui Diplomasi Parlemen antara lain adalah Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *“No- one Left Behind”*. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).

Palembang merupakan daerah yang sangat strategis sebagai Ibu Kota Sumatera Selatan dan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Selama tahun 2011 – 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, dan ini seiring dengan posisi Palembang sebagai tuan rumah dari berbagai kegiatan olahraga dan pertemuan internasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Palembang turut terdampak oleh pandemi COVID – 19.

Dalam diskusi ini peserta mendalami lebih jauh bagaimana area kerja sama DPR RI melalui BKSAP dengan Pemerintah Kota Palembang khususnya dalam menggali potensi UMKM Palembang serta membangun kekuatan pertanian Palembang dan Sumatera Selatan.

Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ir. Achmad Hafisz Tohir (F.PAN) ini mengangkat tema **“Urgensi Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Palembang melalui Sinergi dan Kolaborasi serta Optimalisasi Potensinya”**. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 10 September 2021, di Palembang, Sumatera Selatan.

A. Dasar Pengiriman Delegasi

Kegiatan BKSAP SDGs Day di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada 9-11 September 2021, ini didasarkan pada Surat Tugas No.: 57/D/ST-PD.DN/BKSAP-ABA/09/2021 tanggal 6 September 2021.

B. Susunan Delegasi

1. Ir. H. Achmad Hafisz Tohir	Ketua Delegasi/Wakil Ketua BKSAP	F. PAN/A-487
2. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.	Ketua BKSAP	F. Partai Gerindra/A-086
3. Dr. H. Mardani, M.Eng.	Wakil Ketua BKSAP	F. PKS/A-422
4. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, Mcomn&Mediast	Anggota BKSAP	F. PDI-P/A-262
5. Puteri Anetta Komarudin, B.Com	Anggota BKSAP	F. Partai Golkar/A-295
6. Hasbi Anshory, S.E., M.M.	Anggota BKSAP	F. Partai NasDem/A-355
7. Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., L.L.M.	Anggota BKSAP	F. Partai Demokrat/A-546
8. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc. M.A.	Anggota BKSAP	F. PKS/A-449
9. Primus Yustisio, SE	Anggota BKSAP	F. PAN/A-498
10. Ema Umiiyatul Chusnah	Anggota BKSAP	F. PPP/A-471

Dari pihak tuan rumah, hadir dan menyambut Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, Sekda Pemkot Palembang Ratu Dewa, Kepala Perwakilan BI Sumatera Selatan Hari Widodo, pimpinan dan sejumlah mahasiswa dari UIN Raden Fatah dan Universitas Muhammadiyah Palembang.

II. ISI LAPORAN

A. Agenda Kegiatan BKSAP SDGs Day

JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
	Jumat, 10 September 2021	
10.00 WIB	Tiba di Rumah Dinas Wali Kota Palembang	Protokol Pemkot
10.00 - 12.00	Pertemuan dengan Protokol Pemkot Palembang	Protokol Pemkot

12.00 – 13.00	Ishoma	Protokol Pemkot
13.00 – 15.00	<p>Pertemuan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wali Kota Palembang - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah - Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang - Perwakilan Mahasiswa/i UIN Raden Fatah - Perwakilan Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Palembang <p>Acara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambutan dari Wali Kota Palembang 2. Paparan dari Ketua Delegasi 3. Tanya Jawab 	<p>Tempat: RUMAH DINAS WALI KOTA PALEMBANG Talang Semut. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121</p>
15.00	Acara Selesai	Protokol Pemkot

B. Jalannya Kegiatan

Acara terbagi menjadi tiga sesi, yaitu sesi sambutan oleh Wali Kota Palembang H. Harnojoyo dan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra. Sesi kedua adalah sesi paparan yang disampaikan oleh ketua delegasi Ir. Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang merupakan Wakil Ketua BKSAP. Terakhir adalah sesi tanya jawab dari peserta yang terdiri dari OPD pemerintah daerah, sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah dan Universitas Muhammadiyah Palembang

Rincian kegiatan sebagai berikut:

Sesi Sambutan

a. Wali Kota Palembang H. Harnojoyo

Wali Kota Palembang H. Harnojoyo memulai sambutan dengan memaparkan profil singkat Kota Palembang yang selama tahun 2011-2019 mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Palembang yang terdiri dari 1,6 Juta penduduk telah berhasil menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0,01% dan meningkatkan

pembangunan infrastruktur. Namun akibat pandemi COVID – 19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi.

Saat ini program prioritas Palembang banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan lingkungan, terutama dalam merestorasi Sungai Sekanak, pengelolaan Sungai Musi dan konservasi hutan untuk cadangan air. Masyarakat Palembang secara keseluruhan sangat bergantung pada Sungai Musi untuk mata pencaharian, kehidupan sehari-hari, dan transportasi logistik. Maka dari itu, diperlukan rangkaian upaya restorasi sungai Sekanak dan pengelolaan Sungai Musi, agar Sungai Musi menjadi lebih bersih dan baik.

Restorasi Sungai Sekanak yang merupakan anak Sungai Musi akan memakan biaya sekitar Rp 390 miliar, dan semoga diupayakan anggaran yang turun sekaligus dari pemerintah pusat yang disusun bersama-sama dengan DPR RI, karena upaya restorasi tidak bisa dilakukan secara bertahap. Restorasi ini penting untuk dilakukan untuk membersihkan sampah dan limbah di kedua sungai, mencegah banjir dan untuk membangun pariwisata yang lebih baik.

Pemerintah kota Palembang juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Palembang memiliki 373 jenis layanan publik di daerah. Kota ini memiliki sekitar 41 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan dan buka 24 jam. RSUD Bari juga memiliki 107 posko Covid yang tersebar di seluruh daerah. Angka vaksinasi dosis pertama 474 ribu atau sekitar 37,80%, sementara untuk dosis kedua 304 ribu atau sekitar 24%. Sedangkan vaksinasi untuk tenaga kesehatan (nakes) sudah mencapai 99%.

b. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, Fraksi Partai Gerindra

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) adalah salah satu alat kelengkapan dewan dari DPR RI seperti antara lain Komisi I - IX, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi. Tugas DPR selain membuat legislasi atau undang-undang, merancang anggaran bersama pemerintah, juga untuk menjalankan diplomasi parlemen dan fungsi representasi. Kedua fungsi ini bertujuan untuk membela kepentingan dan menampung aspirasi masyarakat.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati oleh Indonesia pada 2015, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dikejar hingga tahun 2030. Tujuan-tujuan ini membentang ke berbagai sektor dari kesehatan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan, lingkungan hingga reformasi birokrasi. Diharapkan tujuan dari SDGs bisa tercapai

dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal atau *no one left behind*. Di tengah pandemi COVID-19, Panja SDGs adalah alat yang bisa digunakan oleh daerah, mengingat BKSAP bisa menjembatani aspirasi masyarakat Palembang.

Sesi Paparan

a. Wakil Ketua BKSAP, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir, Fraksi PAN

Pemimpin delegasi memulai paparan dengan menjelaskan sejarah Indonesia dalam menginisiasi tata keuangan global. Visi besar kemerdekaan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Foto 1. Ketua delegasi Ir. H. Achmad Hafisz Tohir menyampaikan materi tentang diplomasi parlemen yang dijalankan oleh BKSAP.

Implementasi atas mandat konstitusi tersebut antara lain adalah Indonesia menjadi inisiator utama Konferensi Asia-Afrika pada 18-22 April 1955 dengan *outcome* dokumen Dasasila Bandung. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Antalya, Turki, pertengahan November 2015, Indonesia menyerukan reformasi tata keuangan global.

Dalam kesempatan 25th Meeting of the ASEAN Coordinating Council (ACC), Indonesia menginisiasi "Supply Chain and Flow of Goods during the Outbreak".

Peran Diplomasi Parlemen

Implementasi peran tersebut sejatinya adalah menjalankan fungsi Diplomasi Parlemen. Fungsi DPR RI tidak sekadar lembaga negara yang identik dengan legislasi, pengawasan dan penganggaran. Namun, berdasarkan UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada Pasal 69 Ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraannya, berlaku bagi semua penyelenggara hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Penjelasan mengenai kalangan nonpemerintah pada Pasal 5 Ayat (2) UU No.37/1999 tersebut berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi DPR terhadap kerangka representasi rakyat dan diplomasi parlemen. Persfektif inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri oleh DPR RI sebagai *Track-2 Diplomacy*. Diplomasi parlemen hakikatnya adalah diplomasi yang dilakukan oleh anggota parlemen untuk menjalankan politik luar negeri melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU No.37/1999.

Berpijak pada *track-2 diplomacy*, BKSAP sebagai alat kelengkapan DPR RI dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen sebagaimana diatur pada Pasal 83 Ayat (1) huruf "f" juncto Pasal 113-118 UU No.17/2014 tentang MD3. Tugas BKSAP sebagaimana diatur pada Pasal 116 UU No.17/2014 adalah:

1. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;
2. Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
3. Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; dan
4. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

Saat ini jumlah anggota BKSAP 53 orang, yang berasal dari beragam fraksi dan komisi. BKSAP dipimpin oleh satu ketua dengan empat wakil ketua. Secara teknis, lingkup kerja BKSAP adalah Kerja Sama Internasional (KSI), Kerja Sama Bilateral (KSB), Kerja Sama Regional (KSR), dan diplomasi individu.

Peran diplomasi parlemen internasional secara aktif telah dilakukan oleh BKSAP DPR RI dalam Inter-Parliamentary Union (IPU), Asian Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Parliamentary Committee of the World Trade Organization (PCWTO), Parliamentary Speaker's Summit at the G20 (P20) dan Parliamentary Network on IMF and World Bank. Selain itu BKSAP DPR RI juga merupakan inisiator World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD), sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang inklusif. BKSAP telah menginisiasi DPR RI untuk menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Asia Afrika, World Parliamentary Forum on Sustainable Development dan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership.



Foto 2. Anggota BKSAP Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc. M.A. memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan peserta.

BKSAP juga membentuk panitia kerja untuk menindaklanjuti isu-isu yang menjadi perhatian DPR RI yaitu Panja MDGs, Panja MEA, dan Panja KER (Kerjasama Ekonomi Regional). BKSAP juga membentuk Panja Kerja Sama Organisasi Internasional dan Panja Kerja Sama Kawasan

Pasifik Selatan. Yang terbaru, BKSAP telah mengadopsi Panja Kerja Sama Kawasan Pasifik dan Panja SDGs.

Dalam upaya mitigasi pandemi Covid-19, peran BKSAP DPR RI secara garis besar mengacu pada Resolusi PBB mengenai Kerja Sama Internasional Menghadapi Covid-19 yang implementasinya fokus pada Revitalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan optimalisasi program pemulihan ekonomi nasional. Pandemi COVID-19 berdampak pada setiap sektor. Selain sektor kesehatan, sektor ekonomi adalah yang paling terdampak akibat pandemi ini. Ada dua hal yang diingatkan Sekjen PBB. Pertama, pandemi Covid-19 menjungkirbalikkan tatanan kehidupan manusia. Kedua, memicu resesi global yang sangat parah. Untuk itu diperlukan solidaritas, sinergi dan kolaborasi antarmasyarakat pada skala global dan nasional.

Pemulihan Pasca Pandemi

Pandemi telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi beberapa daerah mengalami kontraksi dan secara nasional telah menyebabkan resesi. Tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan mengalami *lost generation* akibat defisit dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu iklim bisnis dari awal memang tidak mendukung pertumbuhan industri yang mendorong produktivitas dan kemandirian bangsa. Maka dari itu pemulihan pasca pandemi secara cepat membutuhkan inovasi-inovasi yang kreatif dan sinergis. Dialog antara BKSAP, pemerintah daerah, akademis dan pelaku usaha nantinya akan melahirkan inovasi dan ide-ide kreatif. Contohnya di Palembang perlu didorong UMKM yang bisa menjual keunggulan lokal daerah, seperti pempek yang tidak bisa ditiru oleh negara lain. DPR RI bisa mendukung kerja sama dengan Bank Indonesia dan Bea Cukai untuk mendukung ekspor barang-barang UMKM khas Indonesia.

Indonesia harus berhenti menjadi negara yang berdagang (*trading*) dan memulai menjadi negara yang memproduksi barang dan peralatan industri secara mandiri. Implementasi konsep semacam *triple helix* dalam dialog antara BKSAP dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain diharapkan dapat tercapai inovasi dalam pelaksanaan diplomasi total Indonesia. Sinergi dan kerja sama merupakan kata kunci terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Sesi Tanya Jawab

Sesi tanya jawab dipimpin oleh Dr. H. Mardani Ali Sera selaku Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PKS. Diskusi dibuka untuk tiga pertanyaan dari kalangan akademisi dan mahasiswa dari kedua perwakilan universitas yang telah hadir dalam kegiatan ini yakni UIN Raden Fatah

dan Universitas Muhammadiyah Palembang. Sesi ini para delegasi dan peserta mendiskusikan secara mendalam mengenai permasalahan ketahanan pangan dan pertanian, ketenagakerjaan dan juga isu vaksinasi yang masih mengalami berbagai permasalahan selama masa pandemi.

Untuk ketahanan pangan, pertanian dan ketenagakerjaan, para delegasi dari DPR RI terus menekankan upaya pendidikan dan inovasi untuk mendorong pertanian di Indonesia. Selama masa pandemi COVID-19, pertanian merupakan sektor esensial yang terus hidup dan semakin penting untuk negara, terutama anak muda yang akan meneruskan pengelolaan bidang ini. Perlu upaya-upaya seperti mendorong digitalisasi dan modernisasi pertanian Indonesia agar tidak kalah saing dengan negara lain yang sudah maju. Indonesia perlu kembali menjadi negara yang agraris dan membangun keberlanjutan pertanian.



Foto 3. Mahasiswa menyampaikan pertanyaan kepada para pembicara.

Mengenai distribusi vaksin dan penanganan covid yang masih menjadi isu di Palembang, delegasi DPR RI kembali mengingatkan bahwa pandemi adalah permasalahan yang membutuhkan kerja sama dari berbagai *stakeholder* di daerah. Proses distribusi vaksin memang masih kompleks di pemerintah, maka dari itu perlu adanya dialog dan koordinasi yang lebih intensif antara universitas, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Daerah juga perlu mengajak para tokoh agama dan daerah untuk mempromosikan vaksinasi, agar

masyarakat bisa memiliki pengertian yang mendalam mengenai vaksinasi dan mentaati protokol kesehatan bersama.



Foto 4. Wali Kota Palembang H. Harnojojo memberikan cendera mata kepada Ketua BKSAP Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.



Foto 5. Delegasi BKSAP berfoto bersama Wali Kota Palembang H. Harnojojo.



Foto 6. Delegasi BKSAP berfoto bersama mahasiswa usai acara BKSAP SDGs Day.

III. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan BKSAP SDGs Day berjalan lancar dan sesuai dengan program acara yang telah disusun. Dari semua presentasi dapat disimpulkan tiga poin berikut:

- Melalui fungsi diplomasi dan representasi, DPR RI akan terus mendukung upaya pemulihan ekonomi dan UMKM daerah Palembang yang telah mengalami disrupsi selama pandemi Covid-19;
- DPR RI melalui BKSAP berkomitmen terus aktif dalam berbagai kolaborasi dan kerja sama internasional dan juga daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah; dan
- DPR RI akan terus berupaya membangun dialog dengan daerah untuk mewadahi aspirasi dan masukan dalam untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

IV. PENUTUP

a. Anggaran

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas 10 (sepuluh) Anggota DPR, 1 pejabat dan 5 staf Bagian Alih Bahasa, 3 tenaga ahli, dan 3 wartawan adalah sebesar Rp 286.536.000.

b. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan tautan pemberitaan kegiatan pada:

1. https://www.instagram.com/p/CTpVzfRBvKQ/?utm_medium=copy_link
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34580/t/Fadli+Zon+inginkan+SDGs+Terwujud+Hingga+Tingkat+Desa>

c. Kata Penutup

Demikianlah pokok-pokok laporan pelaksanaan BKSAP SDGs Day pada tanggal 9-11 September 2021 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Atas nama delegasi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada delegasi untuk melaksanakan tugas mulia demi bangsa dan negara Indonesia.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 September 2021
Ketua Delegasi,

ttd.

Ir. H. Achmad Hafisz Tohir
A-487